

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI, DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

A.A Sagung Istri Pradnyaswari ¹

I Nyoman Mahaendra Yasa ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali,
Indonesia

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yaitu meratanya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis, (1) pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, (3) pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah, investasi dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2014 – 2019 dengan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pemerintah, investasi dan tingkat pendidikan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali (2) pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali (3) pengeluaran pemerintah, investasi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci : *pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat*

ABSTRACT

Economic development distribution of economic growth and social welfare. Government spending, investment, education levels are all factors that influence this inequality. The purpose of this study to analyze, (1) government spending, investment, and education level directly on economic growth of districts / cities in Bali Province, (2) government spending, investment, education level and economic growth on the welfare of district / city communities in Bali Province, (3) the indirect effect of government spending, investment and the level of education on the welfare of the community through economic growth in districts / cities in Bali Province. Data used is secondary data from Bali Province Statistics Agency in 2014 - 2019 with path analysis method. The results showed that (1) government spending, investment and education level directly had positive significant effect on the economic growth of districts / cities in Bali Province (2) government spending, investment, education level and economic growth directly had positive significant effect on welfare District / city communities in Bali Province (3) government spending, investment and education levels do not have an indirect effect on community welfare through economic growth in districts / cities in Bali Province

Keywords: government spending, investment, level of education, economic growth, community welfare

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh sebuah negara dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat adalah tingkat layak hidup masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi

dan keadaan sosial masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Wiriana, 2018). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Hukom, 2014).

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi - provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil termasuk Provinsi Bali. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Tujuan inti dari proses pembangunan adalah meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup seperti pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Menurut Oates (Artana Yasa & Arka, 2015), kebijakan otonomi daerah merupakan sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik, karena kebijakan ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah daerah akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah dan penyediaan barang-barang publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Pembangunan dalam lingkup daerah disamping meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, juga perlu memperhatikan pembangunan manusia.

Menurut Santika (2014), tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM (BPS Provinsi Bali, 2018). Suciati et al., (2015) menyatakan IPM adalah salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, IPM digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dalam bentuk ranking kesejahteraan suatu daerah. Informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa] merupakan suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Provinsi Bali yang terkenal dengan pariwisatanya pun tidak luput dari masalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan sekaligus tolak ukur keberhasilan pembangunan, sedangkan IPM merupakan indikator dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Permasalahan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali ini ditunjukkan dari masih adanya disparitas angka IPM kabupaten/kota Provinsi Bali yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2015 – 2019 (Point)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35
Kab. Tabanan	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16
Kab. Badung	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59
Kab. Gianyar	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14
Kab. Klungkung	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71
Kab. Bangli	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35
Kab. Karangasem	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34
Kab. Buleleng	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30
Kota Denpasar	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68
Provinsi Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa, IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari sembilan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kota Denpasar memiliki tingkat IPM tertinggi yaitu sebesar 83,68 point diatas rata – rata IPM Provinsi Bali, lalu Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, disusul oleh Kabupaten Tabanan, Jembrana, Buleleng, Klungkung lalu Kabupaten Bangli dan terakhir Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 67,34 point dibawah rata – rata IPM Provinsi Bali. Urutan tingkat IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat IPM di kabupaten/kota tersebut, maka pembangunan daerahnya semakin baik begitu pula sebaliknya. Informasi tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu masukan yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa masih ada kesenjangan IPM yang salah satunya disebabkan oleh pembangunan daerah yang belum merata antar kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat indeks pembangunan manusia dapat

mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. IPM tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat guna memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Menurut teori pertumbuhan ekonomi neo klasik tradisional yakni teori pertumbuhan ekonomi Solow dalam Todaro (2003:150), bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yaitu, kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi. Dari ketiga faktor tersebut dapat saling berkaitan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Putri & Soesatyo, 2016).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat, sebab pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, karena merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasilnya akan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah.

Menurut Kuncoro (2004:116), hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat kemudian juga didukung dengan hipotesis "trickledown effect" (dampak merembes ke bawah) yang melekat pada "growth paradigm" yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menetes ke kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi (Lubis, 2014).

Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari pengeluaran pemerintah yang tinggi pula. Pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota di

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa] Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak memberikan dampak yang optimal kepada masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan belum merata. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek - proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Osinubi (Pratama & Utama, 2019) menyatakan pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Sumardjoko (2017) menyatakan pemerintah daerah dituntut dapat mendayagunakan sumber daya dan potensi daerah untuk tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan APBD yang efektif dan produktif dengan mengurangi belanja konsumtif, meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi belanja modal guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya yang dapat mengelola sumber daya atau potensi yang ada di daerahnya masing - masing, dan membentuk kerjasama dengan sektor swasta sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat merangsang perkembangan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut yang akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah tersebut juga dipengaruhi oleh besarnya investasi.

Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi, investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan. Pertumbuhan investasi di kabupaten/kota di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kenaikan tersebut tidak disertai oleh pemerataan sehingga dampak dari investasi yang ditanamkan melalui PMA dan PMDN tersebut tidak optimal. Investasi diharapkan merata di kabupaten/kota di Provinsi Bali karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak

terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sukirno (2008:122), investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang – barang modal dan perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengejaran kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Penurunan investasi akan menyebabkan tingkat pendapatan nasional menurun dibawah kapasitas pendapatan nasional. Peningkatan investasi masuk ke dalam suatu daerah akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi - investasi baru sebagai stok modal. Dengan semakin besarnya investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian.

Oleh karena itu, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi (Eliza, 2015). Indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal utama yang perlu dipenuhi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Bali di lapangan, padahal tujuan pembangunan yaitu terciptanya pertumbuhan dan kesejahteraan yang merata melalui pendidikan, yang dimana dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik dan akan berdampak terhadap kesejahteraan. Kualitas modal manusia ini misalnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator - indikator lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai laporan pembangunan manusia yang dipublikasikan (UNDP, 2013).

Sektor pendidikan dapat memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas produksi agar tercapai pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2003:404). Melalui pendidikan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia meningkatkan produktivitas, serta dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pendidikan dapat dijadikan sebagai investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan ekonomi, dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas kerja (Putri & Soesatyo, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah, investasi dan tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan variabel Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Alasan pemilihan kabupaten/kota sebagai lokasi penelitian adalah karena adanya disparitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Hubungan antar variabel dapat dijelaskan melalui beberapa jurnal di bawah ini yaitu.

Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Teori klasik yang membahas pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh peran pemerintah adalah Teori Klasik Keynes. Teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Pratama & Utama (2019) menyatakan bahwa diperoleh pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Artinya dengan semakin tinggi pengeluaran pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi daerah masing masing.

Teori investasi menurut Harrod - Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Menurut Sukirno (2000:223), investasi adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah jumlah dari barang-barang modal dan alat-alat produksi yang digunakan untuk peningkatan kegiatan produksi sehingga, produktivitas yang dihasilkan dalam perekonomian akan meningkat. Adi Parwa & Murjana Yasa (2019) menyatakan hasil pengujian pengaruh langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bahwa terdapat hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Becker (1985), human capital artinya manusia bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga modal yang menghasilkan pengembalian (return). Setiap pengeluaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas modal merupakan kegiatan investasi. Modal manusia dapat didefinisikan sebagai jumlah total pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan masyarakat suatu negara. Mulyaputri & Kartika (2017) menyatakan tingkat pendidikan secara langsung berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berarti meningkatnya tingkat pendidikan akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Menurut Sumarsono (2009:6), pendidikan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menambah ketrampilan, pengetahuan

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa] dan meningkatkan kemandirian maupun pembentukan kepribadian seseorang individu. Pendidikan memiliki arti penting yaitu sebagai investasi menganggap manusia sebagai suatu bentuk modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dimasa yang akan datang.

Konsep dan teori kesejahteraan masyarakat bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu saja tetapi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan upaya yang dilakukan pemerintah melalui upaya - upaya seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi (Edogbanya et al, 2013). Hasil penelitian Pratiwi & Indrajaya (2019) menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2000 - 2016, pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali.

Investasi yang dilakukan dalam perekonomian memiliki pengaruh serta mendorong tinggi rendahnya ekonomi suatu negara, keadaan ini disebabkan karena melalui investasi akan dapat meningkatkan produksi dan memberikan kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Diah Windu Antari & Marhaeni (2019) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali, karena investasi di kabupaten/kota Provinsi Bali tidak merata, dimana investasi cenderung di daerah pariwisata, sehingga menyebabkan pola pembangunan menjadi tidak seragam dan penyerapan tenaga kerja menjadi tidak merata serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, Pratama & Darsana (2016) menyatakan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan menurut Kabupaten/Kota tahun 2011-2016 di Provinsi Bali.

Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada agar siap untuk bersaing dimasa yang akan datang baik dalam lingkungan individual atau kelompok/masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Widyastuti (2012) menyatakan bahwa nilai hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesejahteraan keluarga di Jawa Tengah pada tahun

2009 adalah negatif dikarenakan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan tingkat dasar ataupun tingkat menengah, karena untuk meneruskan pendidikan tingkat tinggi dibutuhkan biaya yang dapat menghabiskan pendapatan keluarga tersebut. Sebaliknya Maulana & Wibowo (2013) yang menyatakan pendidikan secara signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Aini et al., (2018) juga menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Wahyuningsih (2012) menyatakan pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Pengaruh positif menunjukkan hubungan yang searah antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Teknik Analisis Data

Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugyiono, 2017:232).

Analisis jalur (*Path Analysis*)

Persamaan struktural dapat dilihat sebagai berikut. Struktur I

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

Struktur II

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

Y1	= Pertumbuhan Ekonomi
Y2	= Kesejahteraan Masyarakat
X1	= Pengeluaran Pemerintah
X2	= Investasi
X3	= Tingkat Pendidikan
e ₁ , e ₂	= Standar Error
β ₁ , β ₂ , β ₃ , β ₄ , β ₅ , β ₆ , β ₇	= Koefisien regresi untuk masing-masing variabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu data pada variabel penelitian berdasarkan jumlah sampel, nilai rata – rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengeluaran Pemerintah	54	599268.00	4584805.93	1567716.9250	981224.82361
Investasi	54	2298	7065808	1530226.41	2086980.576
Pendidikan	54	5.39	11.23	8.0450	1.62208
Pertumbuhan Ekonomi	54	5.06	7.00	5.9648	.47863
Kesejahteraan Masyarakat	54	64.01	83.68	73.0457	5.52091
Valid N (listwise)	54				

Sumber : Lampiran 2

Tabel 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah (X1) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 599.268.000.000 yang diperoleh Kabupaten Bangli pada tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar Rp. 4.584.805.930.000 yang diperoleh Kota Denpasar pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar Rp. 1.567.716.925.000 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp. 981.224.823.610 yang memiliki makna bahwa terjadi penyimpangan nilai pengeluaran pemerintah pada nilai rata-ratanya sebesar Rp. 981.224.823.610.

Investasi (X2) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 2.298.000.000 yang diperoleh Kabupaten Bangli pada tahun 2019 dan nilai maksimum sebesar Rp. 7.065.808.000.000 yang diperoleh Kabupaten Jembrana pada tahun 2016. Nilai rata-rata sebesar Rp. 1.530.226.410.000 dengan standar deviasi sebesar Rp 2.086.980.576.000 yang memiliki makna bahwa terjadi penyimpangan nilai investasi pada nilai rata-ratanya sebesar Rp 2.086.980.576.000.

Tingkat pendidikan (X3) memiliki nilai minimum sebesar 5,39 tahun yang diperoleh Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar 11,23 tahun yang diperoleh Kota Denpasar pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 8,0450 tahun dengan standar deviasi sebesar 1,62208 tahun yang memiliki makna bahwa terjadi penyimpangan nilai tingkat pendidikan pada nilai rata- ratanya sebesar 1,62208 tahun.

Pertumbuhan ekonomi (Y1) memiliki nilai minimum sebesar 5,06 persen yang diperoleh Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 7,00 persen yang diperoleh Kota Denpasar pada tahun 2014. Nilai rata-rata sebesar 73,0457 persen dengan standar deviasi sebesar 0,47863 persen yang memiliki makna bahwa terjadi penyimpangan nilai pertumbuhan ekonomi pada nilai rata-ratanya sebesar 0,47863 persen.

Kesejahteraan masyarakat (Y2) memiliki nilai minimum sebesar 64,01 point yang diperoleh Kabupaten Karangasem pada tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar 83,68 point yang diperoleh Kota Denpasar pada tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 73,0457 point dengan standar deviasi sebesar 5,52091 point yang memiliki makna bahwa terjadi penyimpangan nilai kesejahteraan masyarakat pada nilai rata-ratanya sebesar 5,52091 point.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh langsung

1) Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah (X1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,311 dengan nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$, maka hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini arti bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar satu juta rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,311 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Klasik Keynes yang menyatakan campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Implikasi pandangan Keynes adalah bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah) (Sukirno,2006:423). Pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah diberbagai bidang seperti sarana dan prasarana.

Pembentukan modal di bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi social overhead capital (SOC) yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa]
SOC ini sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan berbagai fasilitas publik, namun tanpa adanya fasilitas publik ini maka pihak swasta tidak berminat untuk menanamkan modalnya (Safira et al., 2019).

Menurut Arsyad (1999:41), bahwa infrastruktur (*social overhead capital*) seperti jalan, jembatan dan pelabuhan walaupun tidak memberikan kontribusi secara langsung pada produksi output, tetapi infrastruktur memberikan peranan yang esensial dalam aktivitas ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan di daerah selanjutnya akan lebih memilih mengadopsi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi daerah itu sendiri, tentunya tuntutan pengenalan potensi daerah dapat dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan daerahnya.

Hal ini berarti pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali yang dilihat dari anggaran pengeluaran konsumsi pemerintah sudah cukup efektif sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah lebih berkaitan erat dengan anggaran pengeluaran konsumsi pemerintah dimana secara langsung akan mempengaruhi penerimaan daerah dan pembiayaan - pembiayaan daerah, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Utama (2019) dan Wahyuni et al., (2014) yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Artinya dengan semakin tinggi pengeluaran pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, karena pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sejalan juga dengan penelitian Romi Juliansyah (2018) yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Diperkuat oleh hasil penelitian Lee et al., (2019) yang menyatakan di Korea, pengeluaran pemerintah bidang budaya, jaminan sosial, dan pengeluaran lingkungan umumnya positif dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Meyer et al., (2017) juga menyatakan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan

pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan.

2) Pengaruh langsung investasi (X2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,284 dengan nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$, maka hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa apabila investasi meningkat sebesar satu juta rupiah, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,284 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori investasi Harrod Domar investasi memberikan peranan penting pembentukan modal dalam pertumbuhan ekonomi, dimana jika investasi yang berupa peningkatan barang-barang kapital dan peningkatan infrastruktur dilakukan dalam suatu negara maka akan menambah kemampuan produktivitas negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan akumulasi modal untuk mendirikan sejumlah gedung dan membeli peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga output yang dihasilkan suatu negara akan meningkat dan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian di suatu daerah, baik itu asing (PMA) maupun domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif (Taufik, 2011). Investasi yang mempunyai multiplier effect berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang diukur melalui kenaikan pendapatan. Artinya apabila pendapatan meningkat, jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi akan meningkat pula. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan kerja.

Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena semakin besar investasi maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Investasi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan segala hal bagi kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan pendapatan regional meningkat, sehingga pertumbuhannya pun meningkat. Hal ini berarti investasi yang ditanamkan di kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui PMDN dan

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa] PMA memberikan dampak positif sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Adi Parwa dan Murjana Yasa (2019), Wahyuni et al., (2014) dan (Danawati, 2016) juga menyatakan investasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kurniawan et al., (2018) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat. Didukung juga oleh penelitian Bakari (2017) menemukan bahwa ada dampak positif dari investasi dalam negeri, ekspor dan tenaga kerja untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di Malaysia. Penelitian Makuyana & Odhiambo (2019) juga menyatakan investasi swasta, yang memiliki pengaruh signifikan dan positif secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Malawi.

3) Pengaruh langsung tingkat pendidikan (X3) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,312 dengan nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$, maka hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,312 persen dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori modal manusia (Human Capital). Dalam teori Human Capital (Jhingan, 2004:414) pengertian pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Menurut Becker (1985), human capital adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (capital) yang menghasilkan pengembalian (return) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal. Adam Smith, Von Threnen, dan Alfred Marshall sependapat bahwa human capital terdiri dari kecakapan-kecakapan yang diperoleh melalui pendidikan dan berguna bagi semua anggota masyarakat. Kecakapan-kecakapan tersebut merupakan kekuatan utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Todaro (2003:404) mengungkapkan bahwa pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peranan pendidikan dalam kehidupan adalah sangat penting karena di era globalisasi sekarang ini dunia kerja menuntut sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas, maka dari itu alokasi anggaran fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD sebagaimana yang diamanatkan Pasal 49 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi program prioritas bidang pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun sebagaimana tercantum dalam agenda Nawacita melalui Program Indonesia Pintar dengan dasar hukum Permendikbud No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, diharapkan program tersebut penerapannya merata disetiap daerah agar kualitas SDM semakin baik sehingga dapat bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

Hal ini berarti bahwa pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah cukup merata sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Hal penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyaputri & Kartika (2017) dan Adi Parwa & Murjana Yasa (2017) yang menyatakan tingkat pendidikan secara langsung berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini berarti meningkatnya tingkat pendidikan akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Diperkuat oleh penelitian Hanif & Arshed (2016) yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Afganistan, India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maladewa dan Sri Lanka. Hasil penelitian Jaiyeoba (2015) menunjukkan bahwa investasi pendidikan memainkan peran penting dalam membangun perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara di Nigeria.

4) Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,244 dengan nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$ maka hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengeluaran

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa] pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar satu juta rupiah, maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,244 point dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Rostow dan Musgrave yang yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Rostow menyatakan pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesebroto, 2001:178).

Campur tangan pemerintah guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan dengan sejumlah program sudah disiapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015-2019, disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, sejumlah program dan proyek direncanakan mulai dari pembangunan waduk, pembangkit listrik tenaga uap dan tenaga air, jalan tol, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, hingga tol. Dalam bidang pertanian, adalah agenda membangun program kemandirian pangan dan kesejahteraan produsen pangan, yakni petani kerap terabaikan. Seluruh program dan proyek yang direncanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Terbukti dengan selesainya pembangunan jalan pintas (shortcut) Singaraja – Denpasar. Lokasi untuk titik 1 sampai 4 berada di wilayah Kabupaten Tabanan yang tujuannya untuk mengurai kemacetan, sedangkan titik 5 sampai 10 dibangun di Kabupaten Buleleng. Progresnya saat ini sebanyak 4 lokasi yakni shortcut 3,4,5, 6 telah selesai dan mulai operasi pada Desember 2019. Jalan pintas ini akan memangkas waktu tempuh dari batas kota Singaraja sampai Mengwitani sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu sehingga produktivitas dapat meningkat yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi

pengeluaran konsumsi pemerintah sudah direalisasikan untuk membangun sarana dan prasarana sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi & Indrajaya (2019) yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang dimana dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2000 - 2016, pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan adanya hubungan searah antara pengeluaran pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, sehingga kenaikan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diperkuat juga oleh penelitian Aditia (2015) yang menyatakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Provinsi Bali.

5) Pengaruh langsung investasi (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,242 dengan nilai signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$ maka hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa apabila investasi meningkat sebesar satu juta rupiah, maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,242 point dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Mengacu pada teori investasi Harrod Domar yang menyebutkan investasi memberikan peranan penting pembentukan modal dalam pertumbuhan ekonomi, dimana jika investasi yang berupa peningkatan barang-barang kapital dan peningkatan infrastruktur dilakukan dalam suatu negara maka akan menambah kemampuan produktivitas negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Meningkatnya kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Thomas (2015) menyatakan bahwa investasi merupakan kunci dan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan kesempatan kerja dan

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa] kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan melalui PMDN dan PMA kabupaten/kota di Provinsi Bali berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan yang menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Melalui pengembangan investasi, dapat didorong terciptanya lapangan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah (pendapatan) dari masyarakat, serta diproduksi aneka ragam barang dan jasa yang menjadi pilihan konsumsi bagi masyarakat, di samping juga dapat dihasilkan kestabilan penawaran (supply) barang dan jasa di masyarakat yang akan membantu terbangunnya stabilitas harga (nilai tukar), baik untuk harga barang dan jasa domestik, maupun untuk nilai tukar uang domestik dengan uang asing. Dengan demikian, pengembangan ekonomi masyarakat melalui investasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyuningsih, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama & Darsana (2016) yang menyatakan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan menurut Kabupaten/Kota tahun 2011 - 2016 di Provinsi Bali. Diperkuat dengan penelitian Suciati, dkk (2015) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2007 – 2012 investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6) Pengaruh langsung tingkat pendidikan (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,295 dengan nilai signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ maka hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_6 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa apabila tingkat pendidikan meningkat sebesar satu tahun, maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,295 point dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Pernyataan di atas relevan apabila dikaitkan dengan teori kesejahteraan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Sebagaimana menurut Kolle dalam

Bintarto (1989: 44) yang menyatakan bahwa dalam mengukur kesejahteraan seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kesejahteraan salah satunya adalah melalui pendidikan. Dalam Kolle, pendidikan ini masuk ke dalam segi mental dan spiritual dalam mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktivitas yang akan didapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka orang tersebut memiliki kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Pembagian kerja atau spesialisasi kerja merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat menambah pendapatan atau gaji yang lebih tinggi, kemudian membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi keluarganya.

Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan adalah segala usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada agar siap untuk bersaing dimasa yang akan datang baik dalam lingkungan individual atau kelompok/masyarakat. Semakin tinggi pendidikan dan kualitas pendidikan serta memiliki keterampilan yang melengkapi pendidikan formal memungkinkan mereka mendapat keuntungan yang lebih tinggi. Menurut Aslam (2008) dan Colclough (2009), meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan tetapi membawa orang tersebut keluar dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan melalui peningkatan mutu pendidikan, derajat kesehatan dan perbaikan gizi, diharapkan akan menumbuhkan inisiatif atau prakarsa untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian produktivitas nasional dan regional dapat ditingkatkan. Pembangunan harus berdasarkan kemauan dan kemampuan internal dalam masyarakat yang bersangkutan, dimana merupakan suatu proses penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, kontribusi dan partisipasi aktif dan kreatif masyarakat lokal dalam pembangunan sehingga tercipta kesejahteraan (Widyastuti, 2012).

Hal ini berarti bahwa pendidikan yang diperoleh masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Aini et al., (2018) menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan pada masyarakat di Kelurahan Kesatrian. apabila dikaitkan dengan teori kesejahteraan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Diperkuat juga oleh hasil penelitian Maulana & Wibowo (2013) yang menyatakan pendidikan secara

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa]
signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

7) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,299 dengan nilai signifikansi sebesar $0,023 < 0,05$ maka hal ini mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_7 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar satu persen, maka kesejahteraan akan meningkat sebesar 0,299 point dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 1999:81). Menurut Mirza (2012), semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang digambarkan dengan gini rasio. Laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya, namun tingkat gini rasio semakin menurun yang berarti bahwa pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin baik setiap tahunnya.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (pembangunan manusia) merupakan hubungan yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi (Lubis, 2014). Pertumbuhan

ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia (Wahyuningsih, 2012).

Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih ke masyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan terjadinya peningkatan pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik (Sholihah & Munari Kustanto, 2017). Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Penentuan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan yang adil dan makmur dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Awandari (2016) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Diperkuat juga oleh penelitian Wijayanti dan Darsana (2015), Artana Yasa (2015), Pratama & Darsana (2016), dan Wahyuningsih (2012) menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh tidak langsung

1) Uji pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali

Oleh karena zhitung sebesar $1,7026 < 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh pengeluaran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2). Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah secara tidak langsung tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2) Uji pengaruh tidak langsung investasi (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali

Oleh karena zhitung sebesar $1,6484 < 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa

Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa] pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh investasi (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2). Dengan kata lain, investasi secara tidak langsung tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

3) Uji pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui pertumbuhan ekonomi (Y1) kabupaten/kota di Provinsi Bali

Oleh karena zhitung sebesar $1,7145 < 1,96$ maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh tingkat pendidikan (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2). Dengan kata lain, tingkat pendidikan secara tidak langsung tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SIMPULAN

- 1) Pengeluaran pemerintah, investasi dan tingkat pendidikan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Pengeluaran pemerintah, investasi, tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Pengeluaran pemerintah, investasi dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan yang telah disajikan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan dan mendistribusikan anggaran pengeluaran konsumsi pemerintah yang tercantum dalam PDRB menurut pengeluaran dengan tepat sasaran. Jika pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut tepat sasaran maka kualitas suatu daerah tersebut akan menjadi semakin baik, yang dimana pendidikan, infrastruktur, pelayanan

publik dan yang lainnya akan semakin baik sehingga pertumbuhan kesejahteraan akan meningkat.

- 2) Perkembangan investasi di kabupaten/kota di Provinsi Bali merupakan hal yang sangat penting untuk pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan saling bersinergi membuat regulasi terkait jaminan investasi agar para investor merasa aman berinvestasi diseluruh kabupaten/kota Provinsi Bali yang dimana investasi tersebut memberikan multiplier efek yang bagi daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Bali perlu ditingkatkan, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan kualitas pendidikan dimasing – masing daerah, pengalokasian anggaran pendidikan diwajibkan minimal 20% dari APBD, yang dimana pendidikan diharapkan merata sehingga semua bisa mendapatkan program pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun untuk memberikan kesempatan pendidikan seluas – luasnya kepada penduduk. Jika pendidikan dimasing – masing daerah merata maka daerah tersebut akan memiliki kesempatan untuk berkembang agar menjadi lebih baik.

REFRENSI

- Adi Parwa, I. G. N. J. L. dan I Gusti Wayan Murjana Yasa. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Investasi Terhadap Pertumbuhan EKonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8(5), 945–973.
- Aini, E. N., Isnaini, I., & Sukamti, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal (TMJ)*, 3(1), 2620 – 3383.
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 117–127.
- Artana Yasa, I. dan Sudarsana Arka. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8 [1](2301–8968), 63–71.
- Asiri, A. A. A., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2016). Pengaruh Belanja Modal Dan Investasi Swasta Kesempatan Kerja Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(03), 334 – 347.
- Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 02(1), 1–9.

- Pengaruh Pengeluaran [A.A Sagung Istri Pradnyaswari, I Nyoman Mahaendra Yasa]
- Awandari, L. P. P. dan I Gusti Bagus Indrajaya (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal EP Unud*, 5(ISSN: 2303-0178), 1435– 1462.
- Bakari, S. (2017). The Impact of Domestic Investment on Economic Growth: New Evidence from Malaysia. MPRA Paper No. 79436, 79436, 1–18.
- Becker, G. S. (1985). Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor. *Journal of Labor Economic*, S33–S58.
- Brudeseth. (2015). A Social Workers Guide to Working In School. Adelaide: Australian Association of Social Workers.
- Caraka, Rezzy Eko. 2019. Pemodelan Regresi Panel Pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 12(1) : 55-61
- Diah Windu Antari dan Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni. (2019). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 9(11), 2390–2418.
- Edogbanya, Adejoh. (2013). Revenues Generations: Impacts on Governments Developmental Effort (A Study of Selected Local Council in Kogi East Senatorial District). *Global Journal of Management and Business Research*, 13(4),12-26.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *Pekbis Jurnal*, 7(3), 200– 210.
- Elizabeth A. Stanton. 2007. The Human Development Index: A History. Working Paper Global Development and Environment Institute Tufts University.No. 127.
- Fazaalloh, A. M. (2016). Penanaman Modal Asing dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Suatu Analisis Kausalitas. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12 [1](2303–0186), 47–54.
- Hanif, N., & Arshed, N. (2016). Relationship between school education and economic growth: SAARC countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(1), 294–300.
- Harijono, G. S. dan I Made Suyana Utama. (1983). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi. *Kobe Journal of Medical Sciences*, 29(1), 1–15.
- Hukom, A. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120–129.
- Jaiyeoba, S. (2015). Human Capital Investment and Economic Growth in Nigeria. *African Research Review*, 9(1), 30.
- Juliansyah, R. (2018). the Influence of Investments, Government Expenditure and Labors on Economic Growth in Aceh Province. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 5(2), 184–199.
- Juma'eh, Tiawon, H., & Hukom, A. (2020). Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 40–45.
- Krismajaya, I. P. dan Ni Putu Martini Dewi. (2019). Pengaruh Belanja Daerah Dan Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan

- Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 8 [6](2303–0178), 1390–1422.
- Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Inovasi*, 13(2), 82.
- Lee, J. C., Won, Y. J., & Jei, S. Y. (2019). Study of the relationship between government expenditures and economic growth for China and Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 11(22).
- Lindblad, J. Thomas. 2015. Foreign Direct Investment In Indonesia : Fifty Years Of Discourse. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 51 (2) : 217-273.
- Lipsev, Robert E and Sjöholm, Fredrik. 2011. Foreign Direct Investment And Growth In East Asia: Lessons For Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 47, No. 1, 2011: 35–63.
- Lubis, C. A. B. E. (2014). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Economica*, 10 No 2, 187–193.
- Makuyana, G., & Odhiambo, N. M. (2019). Public and private investment and economic growth in Malawi: an ARDL-bounds testing approach. *Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja*, 32(1), 673–689.
- Maulana, R., & Wibowo, P. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007 - 2011. *Journal of Economics and Policy*, 6(2), 164–169.
- Resosudarmo, B. P., & Abdurrohman. (2018). Is Being Stuck with a Five Percent Growth Rate a New Normal for Indonesia? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(2), 141–164.
- Taufik, M., Rochaida, E., & Fitriadi. (2011). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7 [2](ISSN : 2301-8986), 90–101.
- Wiagustini, N. L. P., Meydianawthi, L. G., Mustanda, I. K., & Abundanti, N. (2017). Potensi Pengembangan Investasi Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.